

**PERAN MEDIA MASSA ONLINE TERHADAP PILIHAN  
POLITIK MAHASISWA DALAM PILPRES 2019 PERSPEKTIF  
SIYASAH**

**(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**HENI APRILIA  
NPM 1621020544**

**Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

**PERAN MEDIA MASSA ONLINE TERHADAP PILIHAN  
POLITIK MAHASISWA DALAM PILPRES 2019 PERSPEKTIF  
SIYASAH**

**(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**HENI APRILIA  
NPM 1621020544**

**Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar 'iyyah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.  
Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Politik sangat erat berhubungan dengan media, karena salah satu tujuan media yakni untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai hal dalam berpolitik. Media massa ini sangatlah mempunyai peran penting terhadap pilihan politik mahasiswa itu sendiri yaitu berkisar 50%, dapat diartikan ketika seseorang telah mengalami terpaan media massa, pengaruh media massa bisa terjadi dalam bentuk perubahan sikap yang merupakan suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang untuk peranan media massa dalam struktur politik tidak hanya sekedar menyebarkan berbagai informasi politik ke publik, akan tetapi peranan media massa ini sangat potensial dalam memasukkan input politik dalam sebuah sistem. Selain itu media massa juga memiliki peran menyampaikan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah kepada rakyat menghadapi merespon masalah-masalah politik yang terjadi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu 1). Bagaimana Peran Media Massa Online Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara dalam Pilpres 2019 dan 2). Bagaimana Pandangan Siyasah Terhadap Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui Peran Media Massa Online Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara dalam Pilpres 2019 dan 2). Untuk Mengetahui Paandangan Siyasah Terhadap Peran Media Massa Online Dalam Pilpres 2019. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditentukan bahwa 1). Mempunyai peran penting media massa online dalam memberikan informasi terhadap pilihan presiden dalam menentukan pilihan politik mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. dan 2). Pandangan siyasah dalam peran media massa online terhadap pilihan politik mahasiswa dalam pilpres 2019 sudah sesuai dengan fiqh siyasah dan merupakan bentuk dari siyasah Idariyahh. Administrasi Negara dimana adanya media massa yang berperan dalam pilihan politik yaitu kebebasan dalam mengemukakan pendapat dimana adanya kebebasan dalam memilih dan menjatuhkan pilihan terhdap pilpres 2019.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Aprilia  
NPM : 1621020544  
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah** (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 08 Mei 2020

Penulis,

Heni Aprilia

NPM. 1621020544





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Nama : Heni Aprilia**

**NPM : 1621020544**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi: PERAN MEDIA MASSA ONLINE TERHADAP PILIHAN  
POLITIK MAHASISWA DALAM PILPRES 2019  
PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Pada Mahasiswa Jurusan  
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**  
**NIP. 195802011986031002**

**Pembimbing II**

**Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**  
**NIP. -**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“PERAN MEDIA MASSA ONLINE TERHADAP PILIHAN POLITIK MAHASISWA DALAM PILPRES 2019 PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”** disusun oleh : **Heni Aprilia NPM : 1621020544** Program Studi : **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

(.....)

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

(.....)

**Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**

(.....)

**Penguji III : Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I**

(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

**Dr. Khairuddin, M.H**

**NPM. 196210221993031002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya. Al-Hujurat Ayat : 6*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 420.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan *Al-Fatihah* beriring selawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Sugiyanto dan (almh) Ibu Sumiasih. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kalian berdua, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
2. Kakakku Nuriyani dan Sulaswan, Andri Siswanto, dan Hariyanto dan Susiyanti yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk kelancaran perkuliahanku serta Keponakanku (Ghufron, Ihsan, Bintang, Khanza, Ni'am, Vero, Ni'am dan Maziid) memberiku semangat, dan selalu menghibur.
3. Kepada keluarga besarku, Harjowiyono dan Poniman yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Sahabat Istimewa, Bayu Eko Saputra fresh graduate yang telah memberikan hiburan, tempat berkeluh kesah, mencurahkan pendapat, dan bantuan semangat serta dukungan selama perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan Prodi Siyasah Syar'iyah (HTN) G, Rini Ambar Sari, Mistati Intun Sari, M. Rafirsa Agung, Dea Indah Monica, Lisa Anisa Fricchillia, Yus Afrida, Fitra Rinaldi Fasya, Evi, Fenty, Misda



dan yang lainnya tanpa terkecuali yang menjadi pendukung, penyemangat, pemberi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju.

6. Teman-teman KKN 126 Desa Wayhalom. Terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kita jalin selama ini.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir, bertindak dan memberikan ilmu yang bermanfaat.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Heni Aprilia dilahirkan di Lempuyang Bandar, pada tanggal 27 April 1997, dan merupakan putri dari Bapak Sugiyanto dan (almh) Ibu Sumiasih.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Bustanul'ulum Way Pengubuan yang diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Bandar Sakti diselesaikan pada tahun 2010, melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Way Pengubuan diselesaikan pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terusan Nunyai pada tahun 2016.

Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Penulis Puisi Mata Pena Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Wayhalom, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019.

Bandar Lampung, 08 Mei 2020

**Heni Aprilia**

**1621020544**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Media Massa Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis dan diselsaikan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Inatn Lampung.

Dalam penulis skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Hi. Muhammad Mukri, M.Ag. yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung lebih baik lagi dan membawa banyak perubahan.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatian untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M. Si. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Selaku Pembimbing I yang selalu mendukung dan mensupport untuk segera menyelesaikan studi dengan waktu tepat.

5. Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Siyasah Syar'iyah yang telah banyak memberi pengetahuan dan pengalaman saya, dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Kedua orang tuaku Bapak Sugiyanto dan (almh) Ibu Sumiasih dan kakak-kakakku (Nuriyani, Sulaswan, Andri, Hari dan Susi) yang turut mendoakan, mensupport serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta Keponakanku (Ghufron, Ihsan, Bintang, Khanza, Ni'am, Vero dan Majiid) memberiku semangat, dan selalu menghibur.
8. Teruntuk teman-teman sekelas dan seperjuangan Siyasah Syar'iyah G terimakasih telah banyak memberi dukungan dalam penelitian ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu kalian berikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam ukhuwah islamiyah.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.



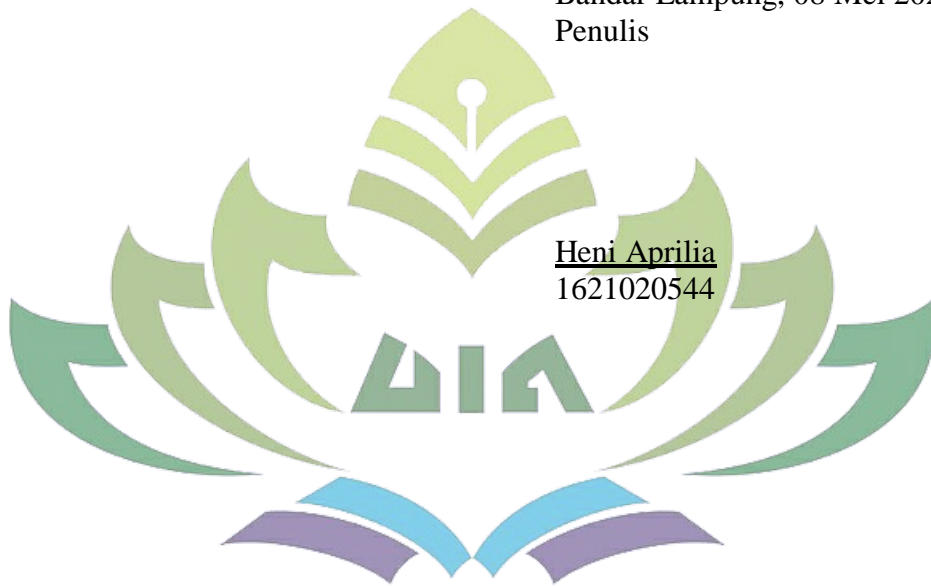
Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman dan ilmu hukum di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 08 Mei 2020

Penulis

Heni Aprilia  
1621020544



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikasi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Media Massa Online	
a. Pengertian Media Massa .....	13
b. Payung Hukum Media Massa .....	19
c. Prinsip Media Massa .....	20
d. Fungsi Media Massa .....	21
B. Teori Peran	
a. Pengertian Peran.....	25
b. Macam-macam Peran.....	26



C. Siyasah	
a. Pengertian dan Macam Siyasah .....	27
b. Siyasah Idariyah .....	36
D. Pilihan Politik.....	38
E. Pilihan Presiden.....	41
F. Tinjauan Pustaka .....	44
<b>BAB III Deskripsi Objek Penelitian</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	48
a. Profil Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.....	48
b. Profil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).....	54
c. Jumlah Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) .....	61
B. Partisipasi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Pada Pilpres 2019.....	61
<b>BAB IV Analisis Penelitian</b>	
A. Peran Media Massa Online Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara dalam Pilpres 2019.....	69
B. Pandangan Siyasah Dalam Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2019 .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Rekomendasi .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Riset .....	1
2. Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	2
3. Lampiran 3 : Hasil Wawancara.....	3
4. Lampiran 4 : Blangko Konsultasi Pembimbing .....	4
5. Lampiran 5 : Gambar .....	5
6. Lampiran 6 : Hasil Turnitin .....	6



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Menghindari kekeliruan memahami penafsiran terhadap judul penelitian yang akan dilakukan, berikut ini akan dijelaskan makna setiap kata dalam judul. Skripsi dengan judul **Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**.

1. Peran adalah perilaku yang di atur dan diharapkan dari seorang dalam posisi tertentu.<sup>2</sup> Peran juga merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika, seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.<sup>3</sup> Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang telah melakukan kewajiban dan hak sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut akan menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah seperangkat tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan kewenangannya dalam masyarakat untuk menyebut jenis media secara khusus yang didesain untuk tercapainya masyarakat yang luas.
2. Media massa menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa media massa atau pers<sup>5</sup> adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari,

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi 1, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 393.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.212-213

<sup>4</sup> Soeganda Priyatna, *Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Kartanegara Perss, 2015), h. 16.

<sup>5</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 3.



memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis yang tersedia. Yang dimaksud media massa dalam penelitian ini adalah media massa online lokal.

3. Pilihan Politik merupakan pilihan politik yang bersifat internal diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi politik yang dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, beropini seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon masalah – masalah politik yang terjadi.<sup>6</sup> Dalam pemilihan pilpres 2019.
4. Mahasiswa dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi<sup>7</sup> disebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Maka mahasiswa merupakan seseorang yang terdaftar secara resmi pada salah satu perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mengikuti pendidikan.<sup>8</sup> Yang penulis maksud adalah mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan Tahun 2016.
5. Siyasah dalam kontek Induk yaitu *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang dalam kamus bahasa Arab *siyasah* secara *etimologi* mempunyai beberapa arti; mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>9</sup> Sedang secara istilah (*termologi*), Ibnu al-Qayim memberi arti *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan

---

<sup>6</sup> Umami Salamah, *Brand Pemimpin Politik*, (Jakarta: Makna Informasi, 2015), h.134.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal

<sup>8</sup> Kurniawati Julian, Baroroh Siti, *Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, *Jurnal Komunikator*, Vol.8, No.2, (November: 2016), h. 53.

<sup>9</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. Ke-5, h. 23.

Allah tidak mewahyukannya.<sup>10</sup> Baik kepentingan agama, sosial dan politik. Maka dapat disimpulkan Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>11</sup> Jika di lihat dari Hukum Tata Negara maka peran media massa berada dalam ruang lingkup Siyasah Idariyah. Siyasah Idariyah merupakan masdar (infinitif) dari kata *idarahasy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>12</sup> Siyasah Idariyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tentang ilmu yang mempelajari asal pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat terutama di bidang administrasi yang di lakukan oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>13</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah apakah media massa berpengaruh bagi pilihan politik mahasiswa pada pilpres 2019 dan bagaimana tinjauan (perspektif) siyasah terkait dengan peran media massa dan pilihan politik mahasiswa suatu penelitian yang membahas tentang Peran Media Massa Terhadap pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah, ketika pesan dari media massa telah disampaikan dan memberikan terpaan media massa apakah ada pengaruh media massa terhadap sikap politik mahasiswa mengenai kebijakan – kebijakan pemerintah.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>11</sup> Ibnu Syarif, Muja dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikir Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

<sup>12</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bay tats-Tsaqafah, Cetak I, 2003), h. 7.

<sup>13</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 6.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, di karenakan adanya sebuah masalah sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal menarik atau alasan – alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Media massa adalah media yang dapat memberikan informasi dalam penyampain visi dan missi baik dari calon presiden dan calon wakil presiden pilpres 2019.
- b. Penulis tertarik dengan penelitian ini, karenaa dengan mengetahuinya informasi melalui media massa tersebut penulis mempunyai keingin untuk meneliti bagaimana peran mahasiswa dalam pemilihan pilpres 2019.
- c. Penulis tertarik dengan penelitian ini karena penulis sendiri mengalami perubahan pilihan kadidat calon presiden dan wakil presiden yang akibat dari media massa online.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Data-data dan literature mengenai skripsi ini banyak tersedia sehingga skripsi ini dapat diselsaikan dan sangat relevansi dengan jurusan peneliti yaitu Hukum Tata Negara.
- b. Lokasi penelitian mudah untuk dijangkau dengan sarana prasarana serta biaya tidak berlebihan.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Media massa Online merupakan alat komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak yang dapat memberikan informasi pesan secara serempak, menyeluruh, cepat kepada semua orang secara luas. Media massa diatur didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa media massa atau pers<sup>14</sup> adalah lebang sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari,

---

<sup>14</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 3.



memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk laainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis yang tersedia.

Fungsi media massa atau pers disebutkan didalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bahwa fungsi media masasa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.<sup>15</sup> Media online menjadi salah satu alat politik secara tidak langsung memiliki peran stategis.<sup>16</sup> Berbagai macam informasi politik dapat diperoleh melalui media online. Media online dan politik dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang mungkin tidak dapat dipisahkan, dalam artian politik dan media media online akan selalu berhubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Cara penyampaian peristiwa-peristiwa politik politik dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan pada mahasiswa mengenai isu-isu terkait perkembangan politik. Hal semacam ini bisa memunculkan pembentukan opini publik atau pendapat umum.

Banyaknya pemberitaan dan opini negatif yang terdapat pada media online membuat kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara seperti kehilangan muara, bahkan hingga masyarakat tidak mengetahui lagi hendak melakukan apa karena perbuatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab . Namun media online juga memiliki peranan untuk memberikan pendidikan politik terutama melalui penyampaian berita dan opini. Salah satu bagian penting dari media online adalah sebagai jalan bagi mahasiswa untuk menyalurkan kebebasan pers dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Adanya kebebasan pers, media online dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi pendidikan politik yang dapat meningkatkan dan mendukung mahasiswa untuk berberan dalam kehidupan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Stifly, *Peran Media Elektronik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Yang Ada Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Kabupaten Sitaro*, (FISIP: UNSRAT, 2012), h.2.

Mahasiswa bebas mengemukakan berbagai pendapat kepada media massa yang tentunya masih dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Di sajikannya berbagai informasi dalam media massa. Baik berita yang berbau politik maupun hal lainnya. Namun yang dimaksudkan disini adalah yang berkaitan dengan masalah politik atau media massa yang memuat berbagai berita politik.

Media massa online kerap dijadikan alternatif bagi mahasiswa untuk mengakses suatu informasi yang sedang terjadi. Seperti halnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara serentak pada bulan April 2019 dan merata di Indonesia yang mengandung perbedaan dukungan terhadap pasangan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan pasangan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden Urut 02, dimana setiap mahasiswa mempunyai perbedaan, selera dan pendapat serta dukungan terhadap calon anggota Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih. Dengan adanya peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka mahasiswa akan mengikuti setiap berita dan informasi secara terus menerus untuk mendapatkan informasi terbaru dari calon anggota Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih. Dengan demikian mahasiswa akan dituntut untuk lebih kritis dalam setiap informasi yang didapat dari situs online.

Pemilihan presiden adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pilpres yang telah menjadi komitmen konstitusional bangsa dan negara Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang tampak melalui keikutsertaan rakyat (pemilih) dalam menentukan pemimpin nasional (presiden dan wakil presiden). Negara republik Indonesia menganut sistem presidensial, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, termuat dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1). Kemudian dalam sistem pemerintahan Indonesia dibagi tiga lembaga kekuasaan (trias politica).<sup>17</sup> Yaitu lembaga

---

<sup>17</sup> Uumbu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif*, Vol.11, No.3, (September: 2014), h. 604.

eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang fungsinya berpisah satu dengan yang lain (separation of power) oleh konstitusi.<sup>18</sup>

Kemampuan mahasiswa untuk memecahkan suatu permasalahan dan menuangkannya dalam bentuk tulisan maupun lisan ditentukan oleh faktor kecerdasan intelegensial dan kecedasan emosional. Melalui kecerdasan intelegensial, seseorang mahasiswa menggunakan ide dan fakta dan salah satu unsurnya adalah pengetahuan sedangkan kecerdasan emosional, seseorang mahasiswa memandang suatu hal dengan memasukkan nilai-nilai kecerdasan emosionalnya dalam memecahkan masalah. dengan demikian mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Informasi yang diberikan oleh media massa mengenai isu politik mengundang perhatian masyarakat intelektual. Isu politik yang ditawarkan oleh media cetak, media elektronik maupun media online sangat beragam apalagi menjelang berlangsungnya suatu peristiwa politik Pilpres 2019.

#### **D. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Peran Media Massa Online dalam hal ini adalah Radar Lampung Online dan Tribun Lampung Online Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Angkatan 2016.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Media Massa Online Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara dalam Pilpres 2019 ?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Terhadap Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 ?

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddequi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 13.



## **F. Tujuan Penelitian**

Setelah identifikasi masalah dan batasan masalah selesai dirumuskan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Peran Media Massa Online Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara dalam Pilpres 2019.
2. Untuk Paandangan Siyasah Terhadap Peran Media Massa Online Dalam Pilpres 2019.

## **G. Singnifikasi Penelitian**

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum melalui media massa kepada mahasiswa dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian sikap politik mahasiswa mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pihak pembaca, dan menjadi bahan sumbang pemikir bagi mahasiswa Hukum Tata Negara.

## **H. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis.<sup>19</sup> Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian lapangan (*field study research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang

---

<sup>19</sup> Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 42.

keadaan sekarang dan interaksi social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>20</sup> Seperti yang telah dijelaskan oleh M. Iqbal Hasan dalam bukunya *Pokok – pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* bahwa penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>21</sup> Yang menjadi objek penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah “suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta – fakta, sifat – sifat , ciri – ciri serta hubungan diantara unsur – unsur yang ada atau fenomena tertentu”.<sup>22</sup> Menurut Sujarweni, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata – mata menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum”.<sup>23</sup> Penelitian ini hanya menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan kenyataan yang terjadi data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat atau non angka.<sup>24</sup>

## **2. Jenis Dan Sumber Data**

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang diteliti. Oleh karenanya memerlukan sumber data yang benar – benar memahami masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

<sup>20</sup> Susidi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

<sup>21</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok – pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

<sup>22</sup> Kaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>23</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

<sup>24</sup> H. Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 123.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertama.<sup>25</sup> Sumber data primer adalah data yang utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui *interview* dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Angkatan 2016.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung berupa buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain yang berfungsi memperkuat data primer. Data ini diperoleh dari buku literatur yang berkaitan dengan Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah.

## 3. Populasi dan Sempel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi, studi atau penelitian juga disebut studi populasi.<sup>26</sup> Populasi merupakan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Angkatan 2016 yang berjumlah 339 mahasiswa.

<sup>25</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 38.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 115.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-10, h. 298.



### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode random sampling teknik yang dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, yaitu 10% dari 339 Mahasiswa. Pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi yaitu 35 mahasiswa.<sup>28</sup>

## **4. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dilapangan mempunyai 2 cara yaitu :

### **a. Wawancara**

Metode wawancara atau *interview* adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah tertentu menggunakan tanya jawab secara lisan.<sup>29</sup> Wawancara yang penulis lakukan termasuk dalam wawancara terpimpin dimana wawancara yang dilakukan telah mempunyai pedoman untuk tanya jawab berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.<sup>30</sup> Hal ini dilakukan untuk menggali dan memperoleh informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mewawancarai 35 mahasiswa.

---

<sup>28</sup> Yulianto Ahmad, Muti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 172.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 187.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 84.

### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui data melalui peninggalan tertulis pertama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>31</sup>

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, data yang dikumpulkan berupa konsep dan bukan angka.<sup>32</sup> Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan dalam deduktif adalah Umumnya Peran Media Massa Online dan khususnya adalah Pilihan Politik Mahasiswa untuk menarik kesimpulan dari khusus ke umum.<sup>33</sup>




---

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 133.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 269.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2015), jilid II, h. 143.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Media Massa Online

##### 1. Pengertian Media Massa Online

Perkembangan media massa saat ini adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan mahasiswa akan informasi secara tidak langsung yang telah digunakan. Namun, pada dasarnya seluruh media massa memiliki peranan yang sama yaitu memberikan informasi, hiburan, edukasi, serta kontrol sosial. Media massa dapat menjadi media pembelajaran dalam kehidupan karena media massa membawa nilai-nilai baru ataupun mengubah nilai-nilai yang sudah ada dan berdampak dalam kurun waktu tertentu.

Media massa merupakan saluran atau alat komunikasi, dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara masal.<sup>34</sup> Media yang mampu membangun interaksi sosial dan terjadinya perubahan sosial, perkembangan media dan teknologi yang sangat pesat memberikan pengaruh yang besar dan mendominasi seluruh sektor kehidupan termasuk di dalamnya media bisa seperti dua ujung pedang yang memberikan efek positif juga negatif.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Mulyana, *Modul Sosiologi Komunikasi*, Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Universitas Marcubwana, 2016), h. 2.

<sup>35</sup> Inda Fitryarini, *Literasi Media Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, Ilmu Komunikasi, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2016), Vol.8, No.1, h. 52.

Menurut Tamburaka media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massa pula, media massa mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi atau berita kepada masyarakat juga pemerintah (pejabat- pejabat pemerintah) dan dalam pembentukan pendapat umum. Media massa dianggap sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas yang tinggi oleh masyarakat, sehingga apapun yang diungkapkan oleh media dianggap suatu kebenaran yang ada di masyarakat, media dianggap dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga media massa dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan pesan atau aspirasi dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat dan termasuk organisasi.<sup>36</sup>

Maksud dalam penelitian ini adalah media massa online. Adanya media massa online, kita dapat dengan mudah memperoleh informasi yang selalu up to date, bahkan dalam hitungan menit. Dibanding dengan media cetak yang terbit secara harian, mingguan ataupun bulanan. Selain kecepatan informasi oleh media massa online, media massa online lebih praktis untuk dibawa kemana- mana karena dapat diunduh kedalam smartphone. Pemberitaan yang diposting di internet juga terdiri dari berbagai macam tema, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, agama, hingga politik. Pemberitaan yang diangkat

---

<sup>36</sup> Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 24.



dalam portal berita juga tidak melihat darimana pemberitaan itu datang. Bukan hanya pemberitaan di tingkat lokal saja, tetapi juga meliputi Nasional.

Saat di tengah masa kampanye menjelang pemilihan pasangan Presiden atau Wakil Presiden Media massa adalah salah satu wahana yang berperan penting di dalam menyampaikan orasi politik para calon. Khususnya, media massa adalah paling banyak yang diminati mahasiswa, sebagai sumber sebuah informasi. Para pasangan-pasangan Calon Presiden saat ini juga tidak terbebas dari macam-macam tudingan serta isu miring, mulai dari yang positif dan negatif atau bahkan terbalik dari kenyataan. Kita tidak ingin mencampuri isu negatif atau tuduhan-tuduhan tersebut.<sup>37</sup>

Media massa diharapkan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kampanye setiap pasangan calon. Media massa dijadikan arena konflik kepentingan, mengingat peranan media massa begitu kuat dalam mempengaruhi pilihan dan perilaku khalayak. politik segera ditinggalkan demi terwujudnya iklim politik yang kondusif aman dan damai. Masyarakat juga harus disadarkan bahwa perbedaan pilihan politik adalah medium untuk saling menghargai, bukan sarana untuk bertikai.

---

<sup>37</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 229.

Media massa online kerap menjadi alternatif bagi mahasiswa untuk mengakses suatu informasi yang sedang terjadi. Seperti halnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara serentak pada bulan April 2019 dan merata di Indonesia yang mengandung perbedaan dukungan terhadap pasangan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan pasangan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden Urut 02, dimana setiap mahasiswa mempunyai perbedaan, selera dan pendapat serta dukungan terhadap calon anggota Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih. Dengan adanya peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka mahasiswa akan mengikuti setiap berita dan informasi secara terus menerus untuk mendapatkan informasi terbaru dari calon anggota Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih. Dengan demikian mahasiswa akan dituntut untuk lebih kritis dalam setiap informasi yang didapat dari situs online.<sup>38</sup>

Keberadaan media massa dalam menyajikan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat ataupun mahasiswa. Beragam informasi yang disajikan dinilai dapat memberi pengaruh yang berwujud positif dan negatif. Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan mahasiswa terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari. Pengaruh media massa bisa

---

<sup>38</sup> Romli, Asep Syamsul M, *Kamus Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis, 2009), h. 56.

terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (*knowledge*) sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat (*opinion*) adapun yang dimaksud perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang dikelola dalam bentuk perinsip sebagai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap suatu objek.

Perkembangan di era modern ini media massa berpengaruh pesat dalam perkembangannya yakni menyajikan berita-berita politik bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu bagi mahasiswa, kini politik menjadi bagian dari mahasiswa,<sup>39</sup> Mahasiswa mengetahui perilaku politik pemerintah, merupakan peristiwa politik dari bagaian media massa sebelum mereka membuat suatu kesimpulan dari informasi yang diterima dari media. Begitu juga dengan mahasiswa Hukum Tata Negara, informasi yang diterima dari media massa menyajikan berbagai berita politik yang memberi tambahan informasi maupun wawasan ilmu terhadap pengetahuan politik.

Mahasiswa merupakan tulang punggung suatu negara.<sup>40</sup> Generasi muda adalah posisi poros berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan Negara. Dibuktikannya kekuatan ketika mahasiswa menyatukan persepsi pada Reformasi dalam Negara Indonesia. Maka, keinginan penulis untuk menyajika kaum muda yang masih mengenyam perkuliahan di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung sebagai objek penelitian. Penulis memilih Fakultas Syariah karena yang paling tertarik mengenai permasalahan politik adalah

---

<sup>39</sup> Prilani, *Problem Etis Jurnalisme Online Di Indoenesia*, Komunikasi Penyiar Islam, (Kediri: April, 2017), Vol.3, No.1, h. 516.

<sup>40</sup> Angkawijaya, *Peran Pengaruh Tinggi Sebagai Agen Perubahan Moral Bangsa (Stadi Kasus Peran Konsep Diri Terhadap Karakter Mulia Pada Mahasiswa di Universitas X Syrabaya)*, Sosiologi, (Surabaya: Universitas X Surabaya, 2017), Vol.4, NO.1.

Jurusan Hukum Tata Negara yang merupakan jurusan yang mengamati perkembangan politik. Dimana mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan membaca dan melihat karena dengan membaca dan melihat, merupakan suatu proses intelektual. Media massa adalah gudang informasi yang bisa dijadikan mahasiswa untuk menjawab rasa ingintahuannya dalam masalah politik.

Media massa pada dasarnya jika berada di tangan yang benar dapat memberikan informasi untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan, tetapi jika berada di tangan yang salah dapat berdampak negatif bagi penggunaannya. Kemajuan ilmu dan teknologi berperan sangat penting terhadap perkembangan media massa, dalam waktu yang relatif singkat informasi tentang berbagai peristiwa di belahan dunia dapat dihadirkan langsung dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian, dan di tempat yang berbeda dari tempat kejadian. Media massa saat ini memiliki peran yang sangat penting sebagai proses transformasi nilai dan norma baru bagi mahasiswa. Hasil interpretasi penelitian Elizabeth Noelle-Nuemann menunjukkan bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam membentuk opini publik.<sup>41</sup>

Media massa *Online* adalah media dengan jenis yang dapat ditemukan di Internet atau situs web atau yang sering disebut dengan media dering (dalam jaringan). Di zaman modern ini karena mudah diakses kapan saja dan dimana saja.<sup>42</sup>

Media massa online merupakan media yang menyajikan karya jurnalistik secara online. Sebagai sebuah hasil dari perkembangan teknologi komunikasi, media online menawarkan sebuah media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar manusia bagi para penggunaannya. Hal ini dikarenakan media online memiliki beberapa

---

<sup>41</sup> Sriyanto, Aim Abdulkarim, Asmawi Zainul, Enok Maryani, *Perilaku Asertif dan Kecenderungan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pola Asuh dan Peran Media Massa*, *JURNAL PSIKOLOGI* (<https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/viewFile/6959/5420>) 41 (JUNI 2014): 74-88.

<sup>42</sup> Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2016), h. 90.



sifat diantaranya adalah interaktif dan egaliter. Menjadi bagian dari media massa generasi ketiga, kemunculan media online di Indonesia diawali dari peristiwa lengsernya Orde Baru tahun 1998, dimana masyarakat membutuhkan sebuah media alternatif untuk menjawab kebutuhan akan informasi seketika, maka pada tahun itu pula munculah [www.detik.com](http://www.detik.com) sebagai bentuk media online pertama di Indonesia.<sup>43</sup>

Mahasiswa dapat memanfaatkan media massa sebagai media ekspresi diri melalui bentuk karya tulis ilmiah atau opini, berita, artikel dan lainnya. Media massa bersifat anonim dan heterogen anonym adalah orang yang terikat dalam sebuah media massa tidak saling mengenal. Sedangkan heterogen adalah orang yang menaruh perhatian pada media massa yang mempunyai keanekaragaman yang terdapat perbedaan dalam segi budaya satus sosial dalam lapisan – lapisan masyarakat.<sup>44</sup>

## 2. Payung Hukum Media Massa

Media massa diatur didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa media massa atau pers<sup>45</sup> adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis yang tersedia.

<sup>43</sup> Fauziahardiyani, *Komunikasi dan Media Massa*, (Bandung: PT Remaja, 2009), h. 16.

<sup>44</sup> Paryati Sudarman, *Menulis di Media Massa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 8.

<sup>45</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 3.

### 3. Prinsip – Prinsip Media Massa

Adapun prinsip-prinsip media massa dalam komunikasi politik:

1. konsistensi. Dalam melakukan komunikasi politik, informasi yang disampaikan harus konsisten dengan substansi platform partai dan konsisten terhadap paradigma partai dan solusi atas problem-problem yang dihadapi oleh konstituen dan publik.
2. Replikasi. Dalam melakukan komunikasi politik, informasi harus disampaikan berulang kali, sehingga konstituen dan publik paham betul dengan content/isi platform partai dan apa yang sedang diperjuangkan oleh partai.
3. *Evidence* (Bukti). Dalam komunikasi politik informasi yang disampaikan oleh partai harus ada dan dapat dibuktikan kebenaran dan eksistensinya. Begitu pula partai harus memberikan bukti-bukti konkrit atas apa yang telah dan sedang mereka kerjakan. Kebanyakan makalah komunikasi, menurut Halloran, tidak seimbang antara makalah mengenai akibat yang ditimbulkan oleh komunikasi di satu sisi dan peran komunikator itu dalam mendisain isi pesan di sisi lain. Dalam komunikasi massa, misalnya, makalah lebih banyak menitikberatkan pada masalah efek atau pengaruh media terhadap khalayak daripada apa yang sebenarnya

mempengaruhi isi media. Keadaan ini juga berlaku pada makalah media dan politik.<sup>46</sup>

#### 4. Fungsi Media Massa

Fungsi media massa atau pers disebutkan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bahwa fungsi media masasa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.<sup>47</sup>

1. Fungsi Informasi yaitu media massa berperan sebagai pemberi atau penyebar berita informasi kepada masyarakat atau komunikatornya, media elektronik misalnya memberikan informasi melalui acra berita yang dikemas sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
2. Fungsi Pendidikan yaitu media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa menjadi bermanfaat karena sebagai pendidik masyarakat. Maka dengan adanya acara – acara diharapkan dapat menyampaikan dan memberikan pendidikan.
3. Fungsi Hiburan yaitu media berperan menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal masyarakat luas. Hiburan tersebut antara lain music, games dan lainnya.

<sup>46</sup> Nurul Shobah, *Peran Media Massa*, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2012), h. 17.

<sup>47</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 3.

4. Fungsi Kontrol Sosial yaitu media massa dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat luas melalui acara atau berita yang disajikan sehingga dengan adanya media massa dapat memberikan pengaruh untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pengaruh media masa bias berupa bentuk dari perubahan pengetahuan, pilahan, dan perilaku. Pada tingkat pengetahuan pengaruh bias terjadi dalam bentuk perubahan presepsi atau perubahan pendapat berupa opini.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang - Undang Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai - nilai dasar demokrasi.
- b. Menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- f. Sebagai pelaku Media Informasi.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 11.

<sup>49</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 6.



Media online menjadi salah satu alat politik secara tidak langsung memiliki peran strategis. Berbagai macam informasi politik dapat diperoleh melalui media online. Media online dan politik dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang mungkin tidak dapat dipisahkan, dalam artian politik dan media media online akan selalu berhubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Cara penyampaian peristiwa-peristiwa politik politik dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan pada mahasiswa mengenai isu-isu terkait perkembangan politik. Hal semacam ini bisa memunculkan pembentukan opini publik atau pendapat umum.

Dalam Al-Qur'an Allah Swt Allah berfirman Q.S. Surat Al-Hujurat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Departemen Agama, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya. Al-Hujurat Ayat : 6*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 420.

Menurut konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar mahasiswa mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi mahasiswa yang beraneka ragam harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk menyampaikannya.<sup>51</sup>

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan seperti ini. Hal tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan pesan (informasi dan pencitraan) secara massif dan menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpencar luas. Pesan politik melalui media massa akan sangat kuat mempengaruhi perilaku politik mahasiswa. Pentingnya perilaku politik dalam menunjang keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini. Asumsi umum menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi warga Negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraan. Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling efektif untuk penyebaran informasi adalah media massa.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 22.

<sup>52</sup> *Ibid.*

## B. Teori Peran

### 1. Pengertian Peran

Teori peran adalah teori aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>53</sup> Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain, yang tindakannya dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>54</sup> Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain, proses, cara dan perbuatan memerankan.<sup>55</sup> Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan sikap dari mahasiswa dalam menentukan pilihannya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden 2019 sebagaimana gencarnya informasi yang beredar luas dalam media massa. Perana merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Teori peranan (*Role Theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*...., h. 212-213.

<sup>54</sup> Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, (Batam: Karisma Publishing Group, 2006), h. 441.

<sup>55</sup> Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, (Jakarta: Cetak IV, 2007), h. 854.

<sup>56</sup> *Ibid.*

## 2. Macam – Macam Peran

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan



pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>57</sup>

### C. Siyasah

#### a. Pengertian dan Macam – Macam Siyasah

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, (ساسة – ساس – ساسية) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>58</sup> Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>59</sup>

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzbur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>60</sup> Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan

<sup>57</sup> Horoeopetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta: Walhi, 2003), h.23.

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3

<sup>59</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 4.

istiqomah.<sup>61</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka dapat dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>62</sup> Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>63</sup>

Secara etimologi *siyasah Syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian :

1. Bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.
2. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>62</sup> Ridwan, *Fiqh Politik...*, h. 75.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 76.

3. Siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>64</sup>

Abdurahman Taj yang merumuskan Siyasah Syar'iyah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dari beberapa arti di atas, dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>65</sup>

Siyasah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah, yakni Siyâsah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Syar'iyah disebut

---

<sup>64</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h 29.

<sup>65</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>66</sup>

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat Siyâsah Syar'iyah, yaitu:

1. Bahwa *Siyâsah Syar'iyah* berhubungan dengan urusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amri).
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan atau semangat syari'at Islam yang universal.<sup>67</sup>

Siyasah Syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggab bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.<sup>68</sup>

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian :

1. *Siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sus*.
2. *Siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 76.

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 6.

<sup>68</sup> Ridwan, *Fiqh Politik...*, h. 77.

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.<sup>69</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).<sup>70</sup> Tujuan utama *siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Oleh karena itu, *siyasah* mempunyai arti sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang dilaksanakan dan yang diuruskan oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.

---

<sup>69</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 83.



Firman Allah dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan konsep politik atau *siyasah*. Di antaranya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem undang-undang, peraturan dan sistem *syura* dalam pemerintahan. Misalnya, yang berkaitan dengan perundang-undangan, Allah Swt. menjelaskan bahwa manusia yang tidak melaksanakan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan adalah kafir, zalim, dan fasiq. Oleh karena itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mengikuti dasar perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, yang berupa prinsip dasar atau konsep dasar sebuah lembaga.

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar pentingnya negara dan pemerintahan.

Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman Q.S. An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

(Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.<sup>71</sup>

Ayat di atas, sekurang-kurangnya menjelaskan tentang lima perkara yang berkaitan dengan konstitusi dasar, yaitu:

1. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain.
2. Ketaatan kepada ulil-amri datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
3. Bahwa ulil-amri haruslah terdiri dari orang-orang mukmin.
4. Rakyat mempunyai hak dan kewajiban dalam sebuah negara dan
5. Diperlukan adanya suatu badan (kehakiman) yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh penguasa, agar dapat memberikan keputusan dan penyelesaian dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan undang-undang atau lembaga tertinggi.<sup>72</sup>

Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah. Namun kekuasaan atau wewenangnya dalam merancang dan menetapkan undang-undang mestilah mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Hadis, lembaga yudikatif haruslah bersifat bebas dan terlepas dari campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga dapat membuat keputusan, baik yang berkaitan dengan kebaikan rakyat, penguasa atau pemimpin, sesuai dengan konstitusi, tanpa rasa takut. dan lembaga eksekutif berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik yang diwujudkan secara langsung ataupun dengan cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar dan jujur. Dengan demikian, sistem *syurâ* mestilah dijadikan asas dalam pemerintahan negara yang merupakan suatu bentuk

<sup>71</sup> Departemen Agama *.Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. An-Nisa' : 59 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 87.

<sup>72</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26.

institusi yang diperintahkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan umat manusia.

Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dalam al-Qur'an adalah :

1. terwujudnya sebuah sistem politik.
2. berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan
3. terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

Secara umum politik mempunyai arti sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. dalam kosa kata bahasa Indonesia terdapat kata "*siasat*", yang berasal dari kata bahasa Arab *siyasah*, karena itu kata *politik*/*siasat* sangat luas jangkauannya.

Al-Qur'an tidak mengemukakan secara *eksplisit* fungsi dan struktur dari sistem politik, namun dari uraian terdahulu dapat ditemukan adanya unsur-unsur tersebut. Sosialisasi politik misalnya, dapat ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual. Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik, dikembangkan dengan sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama. Konsepsi rekrutmen politik dapat ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin.

---

<sup>73</sup> Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 290.

Adanya syarat-syarat subyektif yang relevan dengan kemampuan individual dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, menghendaki proses seleksi dalam pengangkatan pejabat, dan juga pengisytaratan keterbukaan fungsi tersebut bagi setiap warga yang memenuhi syarat.

Tiga fungsi utama yang dikenal sebagai fungsi *out put* atau fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam kewajiban pemerintah membuat aturan- aturan hukum yang adil (*fungsi legislative*), melaksanakan hukum-hukum agama dan hukum perundang-undangan (*fungsi eksekutif*), dan melaksanakan tugas pengadilan terhadap tindakan tindakan yang menyerang dan melanggar hukum (*fungsi yudikatif*).

Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman Q.S. Al-Maidah : 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ  
الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا  
أَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا  
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشَوْا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ  
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.<sup>74</sup>

#### **b. Siyasah Idariyah**

Kata idariyah merupakan masdar (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Siyasah idariyah disebut juga Hukum Administrasi Negara (*al-Ahkam al-Idariyyah*).<sup>75</sup> Sebenarnya tidak ada satu ayat al-Qur'an yang dijumpai kata *al-Idarah*, namun apabila dicermati memang ada kata dalam al-Qur'an yang menyerupai yaitu kata *tudirunaha*<sup>76</sup> dan kata *tadiru*.<sup>77</sup> Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam Islam, administrasi terkait dengan yang disebut Diwan.

<sup>74</sup> Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Al-Maidah : 44 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 115.

<sup>75</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 238.

<sup>76</sup> Departemen Agama, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya*. Al-Baqarah: Ayat 282, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 48.

<sup>77</sup> Departemen Agama, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya*. Al-Ahzab: Ayat 19, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 420.



Bidang *siyasah tasyri''iyyah*, termasuk dalam persolan ahlul halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya:

- a. Bidang siyasah *tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah dan lain-lain.
- b. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- c. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>78</sup>

Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non- muslim(*al-Siyasah al-Duali al-,,Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., h. 48.

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh* ..., h. 14.

Dapat disimpulkan yang dimaksud Siyasah Idariyah pada bagian ini adalah bagaimana sebuah media dapat berperan terhadap pilihan politik dimana adanya kebebasan dalam memilih dan menjatuhkan pilihan terhadap pilpres 2019.

#### **D. Pilihan Politik**

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).<sup>80</sup> Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>81</sup> Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik.<sup>82</sup> Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

---

<sup>80</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori politik*, (Malang : Setara press, 2011), h. 2.

<sup>81</sup> Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Indie Book Corner, 2012), h.2.

<sup>82</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1.

Ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>83</sup> Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Menurut Miriam Budiardjo politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan- peraturan umum yang mengatur ke hidupnya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>84</sup> Dengan definisi tersebut, mengungkap bahwa masyarakat politik dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik.

---

<sup>83</sup> Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*..., h. 3.

<sup>84</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*..., h. 16.

Politik dalam arti luas mempunyai arti sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>85</sup> Pemilihan umum termasuk salah satu permasalahan atau kasus yang terjadi dizaman sekarang diberbagai negara, dapat dipahami secara sederhana bahwa pemilu adalah dikembalikannya hak memilih kepada umat atau rakyat dalam pemilihan para wakilnya yang akan mewakili mereka untuk berbicara atas nama rakyat, menuntut hak-haknya dan membelanya dari hal-hal yang merugikan mereka, seperti yang terjadi di beberapa negara, walaupun rakyat tersebut mewakili kelompok atau partai tertentu tetapi mereka mempunyai otoritas atau berkomunikasi dengan para penguasa dengan mengatas namakan kelompok dan partai mereka atau atas nama umat itu sendiri.<sup>86</sup>

Oleh karena itu muncullahnya konsep Fiqh Islam yang disebut dengan 'An-Niyabah' (Perwakilan), istilah ini sebenarnya sudah populer dalam tatanan kehidupan mereka kemudian istilah ini muncul dalam tataran hukum, kekuasaan, perwakilan, khilafah dan lain-lain. Dan dari sinilah akan timbul suatu istilah yang populer yaitu "*Ahlal-Halli wa al-'Aqd*" yang para ulama mendefinisikannya yaitu segolongan orang yang telah dipilih dan mendapatkan persetujuan dari umat, pendapat mereka dijadikan rujukan seluruh umat serta mendapatkan kepercayaan penuh dari mereka, semua ini

---

<sup>85</sup> Marbun. BN, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 2004), h. 144-145.

<sup>86</sup> Abdul Karim Zaidan et al, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003), h. 4.

akan terlaksana jika pemilihan dilakukan melalui proses pemilihan dari umat itu sendiri.

Teori politik dalam Islam menurut An-Nawawi sebagaimana yang ditulis oleh Suyuthi J Pulungan, *Ahal-Halli wa al-'Aqd* mempunyai anggota diantaranya adalah para ulama'/kyai, para kepala dan para pemuka masyarakat yang mudah berkumpul, dengan pengertian kepala dan para pemuka masyarakat adalah salah satu unsur yang dapat memperjuangkan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>87</sup>

#### **E. Pemilihan Presiden**

Pemilihan presiden adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pilpres yang telah menjadi komitmen konstitusional bangsa dan negara Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang tampak melalui keikutsertaan rakyat (pemilih) dalam menentukan pemimpin nasional (presiden dan wakil presiden). Negara republik Indonesia menganut sistem presidensial, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, termuat dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1). Kemudian dalam sistem pemerintahan Indonesia dibagi tiga lembaga kekuasaan (trias politica).<sup>88</sup> Yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang fungsinya berpisah satu dengan yang lain (separation of power) oleh konstitusi.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara* (Semarang: PT. Pustaka Rizki cet. 2, 2002), h. 91.

<sup>88</sup> Umu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif*, Vol.11, No.3, (September: 2014), h. 604.

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiequi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 13.



Tahun 2019 bisa dikatakan sebagai tahun politik bagi masyarakat Indonesia. Karena di tahun ini terjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya lima tahun ke depan. Peristiwa itu biasa disebut dengan pemilihan umum (pemilu), yang bertujuan untuk memilih para calon wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan kepala negara yang merupakan orang nomor 1 di Indonesia pun bisa menjabat karena pilihan dari rakyat.

Dalam buku Media Komunikasi Politik, Dr Gun Gun Heryanto memaparkan pemilu idealnya adalah kegiatan sukarela, tanpa paksaan, dan cermin dari kekuasaan rakyat. Dalam praktiknya, tentu saja pemilu selalu membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga performa politik yang positif sekaligus menjadi momentum perbaikan berbagai persoalan warisan masa lalu, saat ini, dan potensi permasalahan yang akan datang. McClosky memaknai istilah partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Samuel P. Huntington dalam Gun Gun H. Partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dalam kaitannya dengan regenerasi kepemimpinan nasional, tentu kita berharap partisipasi politik masyarakat yang terorganisasi, damai, legal, efektif. (Gun Gun Heryanto, 2018:128)

Pemilu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan. Sebuah keniscayaan jika seluruh partai politik dan individu-individu yang menjadi kandidat memiliki kepentingan untuk menang. Mereka akan mengoptimalkan seluruh sumber daya politik, termasuk kekuatan para pendukungnya. Jika ada kesiapan untuk menang dalam sebuah rivalitas, seharusnya ada kesiapan untuk kalah. Namun

demikian, banyak kandidat yang ternyata tidak siap kalah sehingga tidak sadar memicu konflik pascapemilu. Misalnya seperti mengalirkan konflik melalui berbagai ikatan tradisional, sentimen etnis, budaya patriarki, ideologis agama, dan sejumlah faktor potensial lainnya (Gun Gun Heryanto, 2018:129) Pemilu 2009, 2014, dan 2019 menggambarkan pada kita bahwa kelompok elite senantiasa menjadi kekuatan dominan dalam rangkaian proses pemilu, serta hanya sedikit memberi akses leluasa kepada publik untuk mendapatkan pemberdayaan politik (political empowerment) yang memadai. Pemilu, dengan segala hingar-bingarnya, seolah menjadi momentum milik para pemimpin partai, calon anggota legislatif (caleg), serta kandidat capres dan cawapres. Penetrasi elite dilakukan mulai dari berbagai varian media massa hingga lingkup keluarga, organisasi, dan kelompok masyarakat.

Media massa online kerap dijadikan alternatif bagi mahasiswa untuk mengakses suatu informasi yang sedang terjadi. Seperti halnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara serentak pada bulan April 2019 dan merata di Indonesia yang mengandung perbedaan dukungan terhadap pasangan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan pasangan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden Urut 02, dimana setiap mahasiswa mempunyai perbedaan, selera dan pendapat serta dukungan terhadap calon anggota Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih. Dengan adanya peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka mahasiswa akan mengikuti setiap berita dan informasi secara terus menerus untuk mendapatkan informasi terbaru dari calon anggota Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih. Dengan demikian mahasiswa akan dituntut untuk lebih kritis dalam setiap informasi yang didapat dari situs online.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terdahulu yang relafan Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan media massa dan Politik sebagai beriku :

1. Skripsi yang berjudul *Implementasi Media Online Harian Rakyat Sulsel Dalam Pemberitaan Politik* yang ditulis oleh M. Naufal Qadri Tamsil, Jurusan Jurnalistik Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Media Online Pada Harian Rakyat Sulsel dari segi portal berita online mampu memberikan informasi dan berita politik berdasarkan target sasaran dan responnya. Informasi yang diberikan bukan cuma berita, tetapi juga video. Implementasi portal Rakyat Sulsel melibatkan interaksi dan penyebaran pesan. Adapun kendala masyarakat dalam mengakses portal berita tersebut karena adanya perubahan bentuk pada portal berita.<sup>90</sup>
2. Skripsi yang berjudul *Analisis Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Ganjar Pranowo Dan Taj Yasin Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023* yang ditulis oleh Oka Rizky Cahyadi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang 2018 Media massa saat ini menjadi salah satu pilihan yang digunakan untuk tujuan

---

<sup>90</sup> M. Naufal Qadri Tamsil, *Implementasi Media Online Harian Rakyat Sulsel Dalam Pemberitaan Politik*, Jurusan Jurnalistik Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h.viii.

komunikasi politik. Media massa berperan sebagai pemberi informasi, publik bisa mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan mengenai isu atau berita yang menjadi kepentingan umum dan dibutuhkan oleh publik. Media massa merupakan komponen dari infrastruktur politik yang berfungsi mensosialisasikan nilai-nilai politik kepada publik dan memberikan edukasi untuk penyadaran hak-hak dan kewajiban politik publik. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Profinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, media massa mempunyai peran dan pengaruh yang besar. Partai politik perlu alat promosi yang efektif dan efisien agar pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh partai politik dapat diterima dan tertanam dibenak calon pemilih sehingga dapat merubah sikap dan pandangan politiknya. Berkampanye di media massa melalui iklan politik dapat membentuk image politik yang positif dan menaikkan popularitas calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan adanya media massa cetak maupun elektronik, lembaga pemerintah penyelenggaraan pemilu dalam hal ini tim sukses pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dapat dengan mudah mengkomunikasikan visi, misi dan program kerja mereka.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Oka Rizky Cahyadi, *Analisis Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Ganjar Pranowo Dan Taj Yasin Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018), h.vii.

3. Skripsi yang berjudul *Peran Media Massa Online Terhadap Pendidikan Politik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Pengaruh Pemberitaan Media Online Terhadap Pemahaman system Pemilu dikalangan Mahasiswa Fisip)* yang ditulis oleh Sri Wahyuni Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018. Didalam skripsi ini peneliti mendeskripsikan strategi atas tanggapan pemahaman sistem pemilu yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Ar-raniry serta Bagaimana peran media online terhadap pemahaman pendidikan politik mahasiswa, khususnya sistem pemilu, dengan melalui media sosial itu diharapkan dapat terjalin komunikasi yang lebih simetris, *nyambung*, dan akrab antara dirinya dengan yang lainnya untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Media online menjadi sarana dalam mewujudkan berpartisipasi dalam aktifitas politik pemerintahan. Dalam pendidikan politik yang diberikan melalui media online. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa media online khususnya radio belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik. Lebih banyak menampilkan aspek hiburan dan komersial. Dengan kata lain media online kurang berdaya dalam upaya meningkatkan pendidikan politik.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Sri Wahyuni, *Peran Media Massa Online Terhadap Pendidikan Politik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Pengaruh Pemberitaan Media Online Terhadap Pemahaman system Pemilu dikalangan Mahasiswa Fisip)*, Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). h.x.



Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang lainnya adalah bahwa akan diteliti mengenai *Peran Media Massa Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*. terhadap perbedaan tersebut maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta,20)

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010)

Abdul Karim Zaidan et al, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003)

Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Ahmad Mulyana, *Modul Sosiologi Komunikasi*, Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Universitas Marcubuana, 2016)

Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bay tats-Tsaqafah, Cetak I, 2003)

Ashadi Siregar ,”Media Pers dan Negara: keluar dari Hegemoni”. *Jurnal ilmu sosial dan Politik*, Vol 4 No. 2 (November 2000)

A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

Departemen Agama.*Al-Qur'an Dan Terjemahnya. An-Nisa : ayat 59* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015)

Elly M.Setiady, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Prena Media Group, 2013)

Fauziahardiyani, *Komunikasi dan Media Massa*, (Bandung: PT Remaja, 2009)

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009)

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

- H. Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss 2014)
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta: Walhi, 2003)
- Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa* ,(Bandung: Simbiosis Rekat Media.2016)
- Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikir Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005)
- Imam Hidayat, *Teori-Teori politik*, (Malang : Setara press, 2011)
- Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Kaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma , 2005)
- Marbun. BN, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 2004)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok – pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Nurul Shobah, *Peran Media Massa*, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2012)
- Paryati Sudarman, *Menulis di Media Massa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

- Romli, Asep Syamsul M, *Kamus Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis, 2009)
- Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*.(Jakarta: Balai Pustaka. 2002)
- Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2012)
- Soeganda Priyatna, *Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Kartanegara Perss, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-10
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)
- Susidi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2015), jilid II
- Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, (Batam: Karisma Publishing Group, 2006)
- Tambaruka, *Agenda Setting Media Massa* ,(Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara* (Semarang: PT. Pustaka Rizki cet. 2, 2002)
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, (Jakarta: Cetak IV, 2007)
- Umami Salamah, *Brand Pemimpin Politik*, (Jakarta: Makna Informasi, 2015)
- Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi 1, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013)
- Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- William L.Rivers, Jay W.Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan*

*Masyarakat Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Yulianto Ahmad, Muti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

## **B. Undang – Undang**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.

## **C. Jurnal**

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Angkawijaya, *Peran Pengaruh Tinggi Sebagai Agen Perubahan Moral Bangsa (Studi Kasus Peran Konsep Diri Terhadap Karakter Mulia Pada Mahasiswa di Universitas X Surabaya)*, Sosiologi, (Surabaya: Universitas X Surabaya, 2017), Vol.4, NO.1.

Inda Fitriyarni, *Literasi Media Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, Ilmu Komunikasi, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2016), Vol.8, No.1,

Kurniawati Julian, *Baroroh Siti, Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, Jurnal Komunikator, Vol.8, No.2, (November: 2016)

M. Naufal Qadri Tamsil, *Implementasi Media Online Harian Rakyat Sulsel Dalam Pemberitaan Politik*, Jurusan Jurnalistik Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)

Oka Rizky Cahyadi, *Analisis Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Ganjar Pranowo Dan Taj Yasin Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018)

Prilani, *Problem Etis Jurnalisme Online Di Indonesia*, Komunikasi Penyiar



Islam, (Kediri: April, 2017), Vol.3, No.1,  
Sriyanto, Aim Abdulkarim, Asmawi Zainul, Enok Maryani, *Perilaku Asertif dan Kecenderungan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pola Asuh dan Peran Media Massa*, *JURNAL PSIKOLOGI*  
(<https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/viewFile/6959/5420>) 41 (JUNI 2014)  
Stifly, *Peran Media Elektronik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Yang Ada Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Kabupaten Sitaro*, (FISIP: UNSRAT, 2012)  
Sri Wahyuni, *Peran Media Massa Online Terhadap Pendidikan Politik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Pengaruh Pemberitaan Media Online Terhadap Pemahaman system Pemilu dikalangan Mahasiswa Fisip)*, Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

#### **D. Website**

<https://lampung.tribunnews.com/2018/08/09/profil-maruf-amin-yang-jadi-cawapres-jokowi-ketua-mui-yang-pernah-jabat-anggota-mpr?page=3>,  
*diakses 21 Maret 2020, pukul 11:24.*  
<https://www.detik.com/pemilu/profil-calon/prabowo-sandi>, di akses tanggal 22  
Maret 2020, pukul 21:46.  
<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, diakses 09 Febuari 2020

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Allen Indra Yudha Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jumat, 06 Maret 2020.  
Wawancara dengan, Amvera Cahya Sinta Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Jumat, 13 Maret 2020.  
Wawancara dengan Dapriyanto Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Selasa, 10 Maret 2020.  
Wawancara dengan, Destri Meyriska Ifani Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Rabu, 11 Maret 2020.

Wawancara dengan, Eby Aprianda Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Selasa, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan, Elkadri Tahir Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Rabu, 11 Maret 2020.

Wawancara dengan, Ellemmia Lorenza Pradana Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Selasa, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan, Fitra Rinaldi Fasya Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Rabu, 11 Maret 2020.

Wawancara dengan, Frans Sisco Khadafi Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Jumat, 13 Maret 2020.

Wawancara dengan, Icha Puspita Sari Mahasiswa SY Angkatan 2016, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Selasa, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan, Misda Sari Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Selasa, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan, M Irvan Rivando Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Kamis, 12 Maret 2020.

Wawancara dengan Revi Puja Sari Mahasiswa SY Angkatan 2016, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Kamis, 05 Maret 2020.

Wawancara dengan Royis Saprinando Mahasiswa SY Angkatan 2016, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Kamis, 05 Maret 2020.